

Nono Sampono Usul Pilkada Langsung Provinsi Dipertahankan dan Pilkada Kabupaten/Kota Melalui DPRD

Jakarta-senayan (19/12)—Anggota Komite I DPD RI membidangi Pertahanan dan Keamanan (Hankam), Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Otonomi Daerah (Otda), Nono Sampono mengamati bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung cenderung lebih banyak membawa nilai-nilai negatif ketimbang nilai-nilai positif khususnya pilkada langsung di tingkat Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, pilkada tingkat Kabupaten-kota pelaksanaannya semestinya dikembalikan melalui DPRD.

“Saya melihat lebih dari satu dekade pilkada langsung diselenggarakan sejak tahun 2005, di kabupaten-kota sangat terlihat sekali terjadi fragmentasi antar kelompok pendukung, bahkan di beberapa daerah terjadi bentrok yang sangat mengganggu kepentingan umum. Pandangan saya sudah layak pilkada tingkat kabupaten-kota dikembalikan ke mekanisme pemilihan DPRD.” Tegas Nono Sampono di sela-sela wawancara di kantornya di Senayan.

Senator Indonesia asal provinsi Maluku ini juga menyampaikan bahwa hendaknya pemilihan langsung tetap dipertahankan pada tataran pemilihan presiden (pilpres) dan pilkada tingkat provinsi, dikarenakan penting untuk memperkuat legitimasi presiden dan gubernur terpilih. Selain itu, pelaksanaan pilpres dan pilkada tingkat provinsi tidak terlalu rentan menjurus pada perpecahan atau bentrok antar pendukung.

“Untuk memperkuat legitimasi presiden terpilih serta gubernur terpilih sebagai representatif pemerintahan pusat, pilpres dan pilkada langsung tingkat provinsi tetap dipertahankan. Di samping itu, saya memperhatikan gejala di tengah masyarakat yang ditimbulkan relatif tidak terlihat.” Jelas Letnan Jenderal (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampono, M.Si

Lebih lanjut, Mantan Komandan Koprs Marinir ini mengingatkan bahwa jangan sampai penerapan demokrasi seperti pelaksanaan pilkada langsung khususnya di tingkat kabupaten dan kota selama ini secara tidak langsung semakin mengikis nilai-nilai jati diri masyarakat Indonesia seperti kebersamaan, gotong royong, saling menghormati di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang selama bertahun-tahun dibangun dan diajarkan oleh para *founding father* sejak berdirinya Republik Indonesia.

“Saya khawatir Demokrasi yang kita terapkan selama ini semakin menjauhkan kita dari nilai-nilai dan jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia. Jangan sampai terjadi di Indonesia seperti penerapan Demokrasi di Uni Soviet yaitu dengan diterapnya Glasnost (*Keterbukaan*) oleh pemerintahan Mikhail Gorbachev pada pertengahan 1980-an justru memecahkan negara Uni Soviet dan pada akhirnya saat ini pemerintahan Putin kembali ke jati dirinya yaitu demokrasi tanpa meninggalkan jati diri Rusia.” Demikian tutup Nono Sampono mengakhiri wawancara.

Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono, M.Si

Ketua Kaukus DPD RI Indonesia Timur dan Anggota DPD RI Dapil Maluku Periode 2014-2019; Mantan Komandan Korps Marinir; Mantan Komandan Paspampres, Mantan Gubernur Akademi Angkatan Laut, Mantan Kepala Basarnas RI